

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA-BMD) PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN DAIRI**

TESIS

Oleh:

**RUTH MASTUTI HERAWATI NAIBAHO
NPM. 151801175**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/20

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA-BMD) PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN DAIRI**

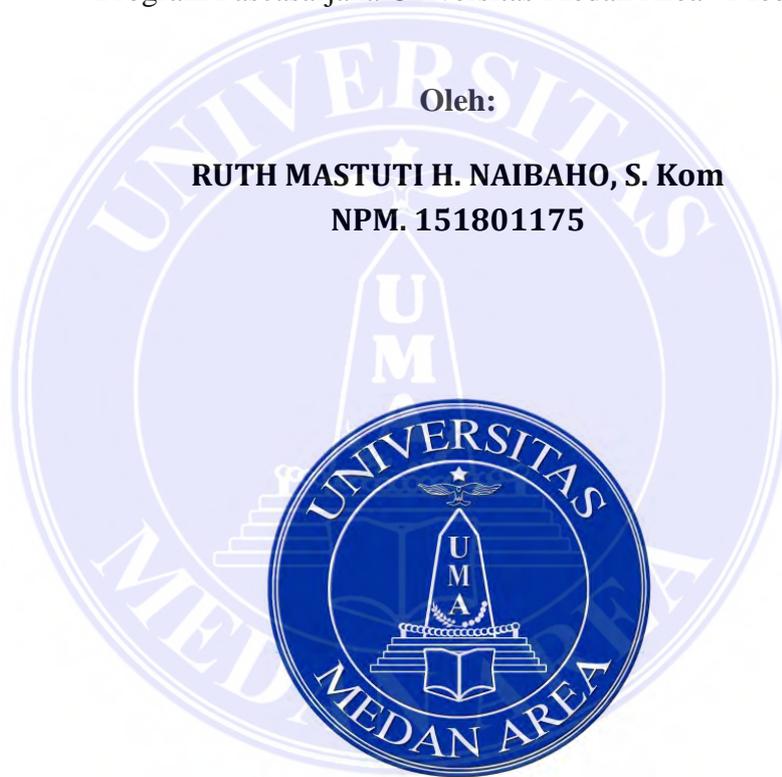
TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik Pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area - Medan

Oleh:

RUTH MASTUTI H. NAIBAHO, S. Kom

NPM. 151801175



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi

N a m a : Ruth Mastuti H. Naibaho

N P M : 151801175

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Warjio, MA

Pembimbing II



Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**




Dr. Warjio, MA

Direktur




Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada tanggal 1 September 2018

N a m a : Ruth Mastuti H. Naibaho

N P M : 151801175



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Sekretaris : Ir. Azwana, MP
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc
Penguji Tamu : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)15/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2018

Yang menyatakan,



[Handwritten Signature]
Ruth Mastuti H. Naibaho

ABSTRAK

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA-BMD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DAIRI

N a m a : Ruth Mastuti Herawati Naibaho
N P M : 151801175

Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD serta pengelolaan/ pengendalian Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi pengguna barang. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan BMD meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Aplikasi SIMDA BMD dikembangkan dalam dua basis, yaitu berbasis dekstop dan berbasis Web serta dapat dikoneksikan dengan Geographic Information System (GIS). Keunggulan dan Manfaat Penerapan SIMDA BMD antara lain sesuai peraturan perundang-undangan, terintegrasi, transfer of knowledge, kesinambungan pemeliharaan dan mudah digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis menganalisis Implementasi Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi. Sampel diambil secara *total sampling*, yang berjumlah 44 orang. Analisis data dengan analisis deskriptif dengan menggunakan tabel frekwensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi dilihat dari komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi telah berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang ada pada Prosedur pengelolaan BMD yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) yang diterapkan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi sebagai aplikasi berbasis computer sangat membantu pemerintah mengelola barang milik daerah sehingga dapat menghasilkan laporan-laporan yang berguna bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan untuk rencana yang akan datang.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Sistem Informasi Manajemen Daerah, Barang Milik Daerah.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM APPLICATION OF REGIONAL PROPERTY (SIMDA-BMD) ON FINANCIAL MANAGEMENT AND DAIRI COUNTY ASSETS

N a m e : Ruth Mastuti H. Naibaho

N P M : 151801175

Regional Management Information System of Regional Property (SIMDA-BMD) is conducted in order to produce the necessary information as a tool of accountability for the implementation of APBN / APBD and the management / control of Regional Property controlled by a user accounting unit of goods. This application program is used for the management of BMD cover planning, procurement, administration, deletion and accounting of regional goods. SIMDA BMD applications are developed in two bases, which are desktop-based and Web-based and can be connected with Geographic Information System (GIS). Advantages and Benefits Implementation of SIMDA BMD, among others according to the laws, integrated, transfer of knowledge, continuity of maintenance and easy to use. This study aims to know and analyze the Implementation of Application Information System Management Regional Property (SIMDA-BMD) On Financial Management And Assets Dairi District. Samples were taken in total sampling, which amounted to 44 people. Data analysis with descriptive analysis by using frequency table. The results of this study indicate that the Implementation of Regional Management Information System of Regional Property (SIMDA-BMD) on Financial Management and Asset of Dairi Regency is seen from communication, Resource, Disposition or attitude of executor, and bureaucratic structure has run effectively according to the provisions contained in the BMD Management Procedures mandated in Government Regulation No. 27 of 2014 on the Management of State / Regional Property. Information System Application of Regional Management of Regional Owned Goods (SIMDA-BMD) applied to the Office of Financial Management and Assets Dairi District as a computer-based application helps the government to manage local property so that it can produce useful reports for local government that can be used for decision-making for future plans.

Keywords: Implementation of policy, Information System of Regional Management, Regional Property.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
ABSTRAKSI	ii
DAFTAR ISI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik	7
2.2. Implementasi Kebijakan	10
2.3. Model Implementasi Kebijakan	13
2.4. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan	20
2.5. Sistem Informasi Barang Milik Daerah	24
2.6. Karakteristik Kualitas Informasi Laporan/Output	28
BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.2. Bentuk Penelitian	30
3.3. Populasi dan Sampel	30
3.4. Definisi Konsep	31
3.5. Metode Pengambilan Data	34
3.6. Metode Analisa Data	34
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Dairi	35
4.1.2. Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	37
4.2. Hasil Penelitian	40
4.2.1. Karakteristik Responden	40
4.2.2. Variabel Penelitian	43
4.3. Pembahasan	55
4.3.1. Implementasi SIMDA-BMD dalam Pengolahan Data Barang Milik Daerah	55
4.3.2. Pengendalian Intern SIMDA-BMD dalam Pengolahan Data Barang Milik Daerah	57
4.3.3. Karakteristik Kualitas Informasi/Output SIMDA-BMD ...	59
4.3.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi SIMDA-BMD Pemerintah Kabupaten Dairi dalam penerapan SIMDA-BMD	61

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Dairi”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng M.Sc , Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
4. Bapak Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc, sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
5. Pimpinan beserta seluruh staf, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi atas informasi yang diberikan kepada penulis guna penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya prodi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
7. Terkhusus untuk Orang Tua (M. Naibaho/H. Br. Siahaan), abang (Yanto Naibaho) dan adik-adik (Kristian Naibaho, Erwin Naibaho, Ronal Naibaho)

beserta eda-edanya (Murni Tamba, Grace Simanjuntak, Lily Siahaan, Herlina Simamora).

8. Terspesial untuk Suami (Hoddi Togatorop) tercinta dan tersayang serta semua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta doa demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 1 September 2018

Penulis

(Ruth Mastuti H. Naibaho)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan di saat transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan terdapat juga Laporan Aset/Barang Milik Daerah (BMD) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikelola oleh Pengurus Barang.

Semakin kompleks permasalahan pengelolaan Aset/BMD, terutama terkait dengan jumlah dan kualitas petugas pengelola barang milik daerah yang ada pada SKPD, semakin kurang akurat data dan informasi mengenai BMD diakibatkan oleh jarak tempuh yang jauh karena kondisi geografis Kabupaten Dairi berbukit-bukit, serta minimnya koordinasi antara penyusun laporan keuangan dengan pengurus barang selaku penanggungjawab pengguna barang sehingga dalam penyampaian Laporan Aset/Barang Milik Daerah oleh Pengurus Barang dari SKPD sering terlambat yang berdampak terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi yang tidak tepat waktu.

Salah satu lembaga pemerintah BPKP RI (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melalui Deputi Pengawasan Bidang

Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan Sistem Informasi disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah khusus terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, Jumlah pengguna SIMDA-BMD sampai dengan Agustus 2015 sebanyak 346 Pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada di Indonesia termasuk di dalamnya pemerintah Kabupaten Dairi (BPKP, 2015).

Pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Dairi secara umum memiliki fungsi yang sangat strategis dan vital. Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017 jumlah Aset tetap Pemerintah daerah sebesar Rp.1.009 Triliun atau kurang lebih 95% dari komposisi aset/kekayaan daerah pemerintah Kabupaten Dairi adalah berbentuk aset tetap berupa tanah, peralatan mesin, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya serta infrastruktur lainnya. Aset ini memiliki nilai yang paling besar dibandingkan dengan jenis aset lainnya. Aset yang begitu besar tentunya perlu didukung oleh sebuah sistem informasi Manajemen yang memungkinkan untuk membantu segala aktivitas berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah khususnya informasi tentang inventarisasi aset daerah. (Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015).

Sistem informasi manajemen barang milik daerah yang digunakan berfungsi mengumpulkan dan mengolah data aset/barang milik daerah serta

mengeluarkannya dalam bentuk laporan. Karena begitu pentingnya sistem informasi manajemen barang milik daerah (SIMDABMD) bagi pemerintah Kabupaten Dairi untuk mendukung inventarisasi, maka evaluasi terhadap sistem informasi manajemen barang milik daerah (SIMDABMD) dianggap perlu dengan tujuan adalah untuk mengetahui apakah sistem informasi SIMDA-BMD yang berjalan telah efektif dan efisien dalam mendukung inventarisasi asset di Kabupaten Dairi dan memberikan usulan perbaikan dari hasil evaluasi penerapan sistem informasi manajemen barang milik daerah.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dimana BMN termasuk di dalamnya adalah bentuk laporan keuangan pemerintah pusat. Mengingat pentingnya peranan laporan keuangan dalam menyajikan informasi pelaksanaan APBN/APBD yang mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter untuk menggerakkan perekonomian nasional yang sehat, Menteri Keuangan selaku pemegang kekuasaan fiskal menunjuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) sebagai pembuat dan pembina Sistem Akuntansi Pemerintah (SiAP). Wujud pelaksanaan tugas sebagai pembuat dan pembina sistem oleh DJPB adalah lahirnya berbagai peraturan dan aplikasi komputer yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di semua level, mulai tingkat Kementerian sampai dengan Satuan Kerja (Satker) (Nasrun dkk., 2012). Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik daerah telah dibuatkan sebuah sistem yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah atau

disebut SIMDA-BMD, sedangkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terdapat sebuah sistem yang diberi nama Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) kedua sistem tersebut tergabung dalam suatu sistem yakni Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Negara (SIMDA-BMN) diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD serta pengelolaan/pengendalian BMD yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi pengguna barang (Pamungkas dkk., 2011).

Dalam penatausahaan aset daerah, pengurus barang merupakan personil yang bertugas mengoperasikan aplikasi SIMDA-BMD. Dalam melakukan pemrosesan data BMD, pengurus barang dapat memanfaatkan 7 menu Data Entry di aplikasi SIMDA-BMD Yaitu Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Penghapusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi sebagai suatu organisasi yang menggunakan pembiayaan APBD harus mampu mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien sebagai wujud pertanggungjawaban publiknya. Untuk mencapai hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi telah menerapkan sistem informasi manajemen daerah terhadap barang milik daerah, oleh karena itu penulis tertarik melakukan peninjauan dan penelitian dengan judul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 menyebabkan terjadinya perubahan paradigma

dalam pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah dari yang awalnya sekedar administratif menjadi pengelolaan yang lebih tertib, akuntabel dan transparan. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan aset Pemerintah Daerah yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja pemerintahan. Sehingga aset dianggap memiliki peranan yang penting dalam mendukung kelancaran operasional organisasi (Putra, 2013). Oleh karena itu BMD harus dikelola dengan prinsip efektif, efisien, profesional dan modern dengan mengedepankan good governance sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pada setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerahnya kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa laporan BMD harus disajikan dalam LKPD berupa neraca pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga informasi yang dilaporkan dapat dijadikan dasar perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Dalam proses pengambilan keputusan, informasi merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi untuk mengolah data dan menyajikan informasi barang milik daerah secara cepat, tepat dan akurat. Penerapan sistem informasi akuntansi bagi pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. BPKP melalui Tim Aplikasi SIMDA pada Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Program aplikasi SIMDA-BMD adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pengelolaan BMD secara terkomputerisasi yang bertujuan untuk menyelaraskan penerapan kebijakan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SIMDA-BMD diharapkan mampu mendukung tercapainya akuntabilitas pemerintah daerah baik di tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) ataupun di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang telah menerapkan SIMDA-BMD untuk penatausahaan barang milik daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti atau mengangkat masalah tersebut di dalam penelitian ini, yaitu dengan judul “Implementasi Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi “.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian, yaitu : Bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.

1.4. Manfaat Penelitian

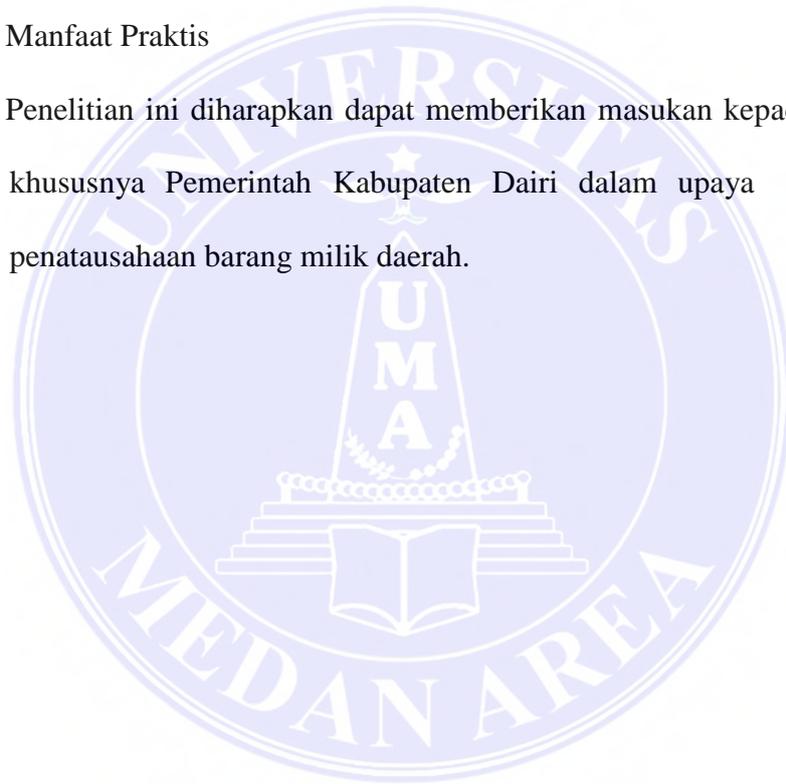
Adapun manfaat penelitian adalah :

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan memperkaya ilmu Administrasi Publik terutama dalam implementasi kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam upaya peningkatan penatausahaan barang milik daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai pengertian yang variatif tergantung dari siapa yang mengemukakan sehingga tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu pengertian yang representatif memuaskan.

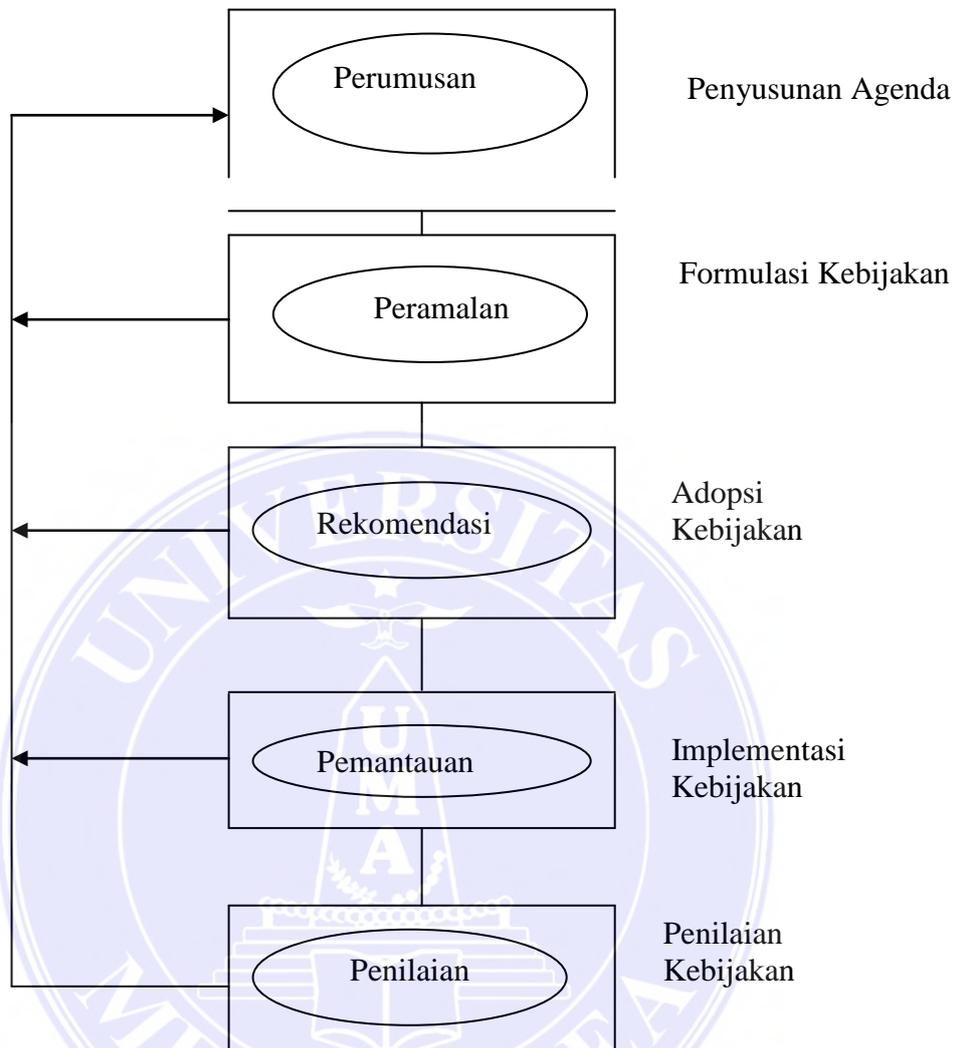
Menurut James Anderson (dalam Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu).

Menurut pendapat Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2000:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*Is whatever governments choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dari pendapat ini mengandung pengertian sebagai suatu keputusan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan, sehingga diam pun bisa dianggap sebagai suatu kebijakan. Selanjutnya Richard Rose (dalam Winarno, 2002:15) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.”

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki ciri-ciri antara lain :

- a. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bersifat positif berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan suatu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apapun.
- c. Serangkaian kegiatan yang tidak berdiri sendiri.
- d. Dibuat dan dilakukan oleh pemerintah.
- e. Didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.
- f. Ditujukan untuk kepentingan umum.

Menurut William Dunn setiap kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang saling bergantung menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Aktivitas kebijakan yang termasuk dalam prosedur analisis kebijakan seperti yang digambarkan oleh William Dunn di bawah ini :



Sumber : Dunn, 2003 : 25.

Gambar 1. Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan

Menurut Winarno (2002:17) kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi tiga kegiatan pokok yaitu :

1. Perumusan Kebijakan publik
2. Implementasi kebijakan publik

3. Evaluasi Kebijakan publik

2.2. Implementasi Kebijakan

Kata implementasi (*implementation*) berasal dari kata dasar verb *implement*, menurut kamus Oxford-Advanced Learner's Dictionary (1995:595) bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara ataupun undang-undang lainnya).

Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.”

Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup usaha-usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil. Tahap implementasi baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan. Namun demikian suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai disebut sebagai *implementation gap* (Andrew Dunsire dalam Abdul Wahab, 1997:61). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut (Walter Williams dalam Abdul Wahab, 1997 : 61).

Lebih lanjut Hogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab, 1997:61) membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. *Non implementation* (tidak terimplementasikan) mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai persoalan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga

betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.

2. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Pelaksanaannya jelek (*bad execution*)
2. Kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*)
3. Kebijakan itu sendiri bernasib jelek (*bad luck*)
4. Sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalam artian telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan dilaksanakan. Disamping itu faktor eksternal perlu diperhatikan pula untuk dapat mendukung bagi kelancaran dalam implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan adalah subyek implementasi kebijakan.

Selanjutnya implementasi kebijakan dapat dianalisa dari beberapa pendekatan meliputi pendekatan struktural, pendekatan prosedural, pendekatan

manajerial, pendekatan berperilaku dan pendekatan politik seperti yang ditulis oleh Abdul Wahab (1997:111-120). Dalam penelitian ini implementasi kebijakan dianalisa dengan menggunakan pendekatan prosedural. Dilihat dari pendekatan prosedural maka implementasi dipandang sebagai proses prosedural. Pendekatan prosedural menjelaskan implementasi dari proses prosedur yang tepat dijalankan dalam implementasi kebijakan.

Definisi prosedur (*procedure*) menurut Richard F. Neulschel (dalam Jogiyanto, 2001:1), sebagai berikut : “Suatu prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.”

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald dan Warren D. Stallings, Jr., (dalam Jogiyanto, 2001:2) mendefinisikan prosedur sebagai berikut : “Suatu prosedur adalah urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakannya, kapan (*when*) dikerjakan dan bagaimana (*how*) mengerjakannya.”

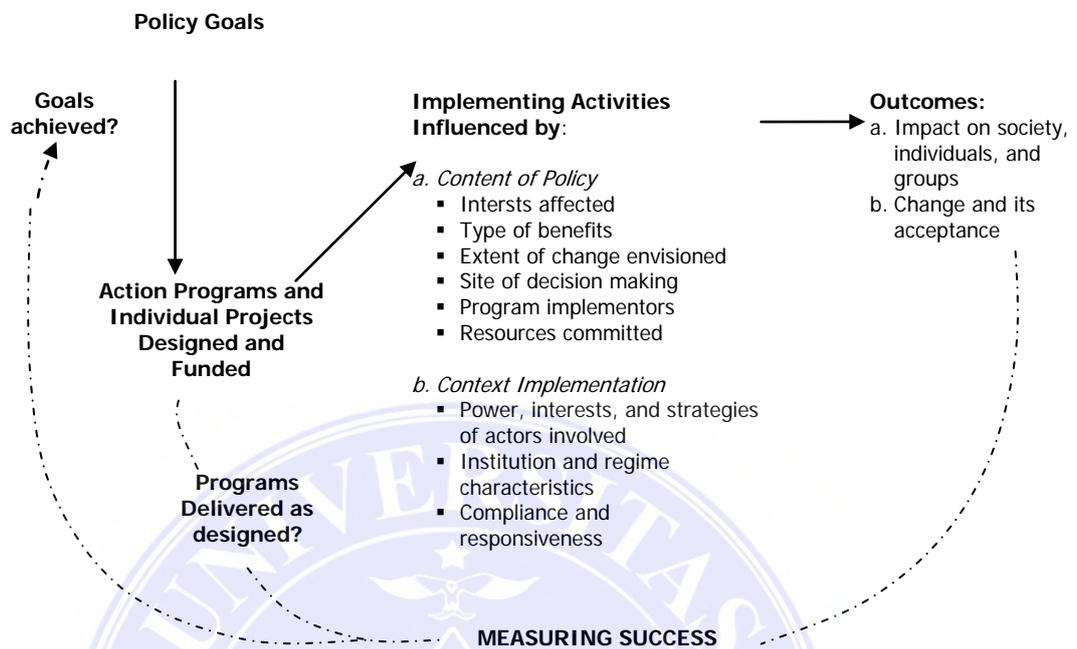
Dengan demikian yang dimaksud prosedur adalah urutan tahapan-tahapan instruksi bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan menyangkut pelaksana, waktu, tata cara dan aturan maupun ketentuan yang berlaku yang dijalankan. Dengan demikian implementasi kebijakan yang dimaksud adalah pelaksanaan suatu kebijakan sesuai tatacara, aturan maupun ketentuan yang berlaku. Dimana yang dimaksud dengan tata cara adalah urutan bagaimana kegiatan

dilakukan, aturan adalah hal-hal yang bersifat mengatur sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan dan ketentuan adalah hal-hal yang bersifat mengikat berkaitan dengan aturan yang ada.

2.3. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Sabatier (1986: 21-48), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

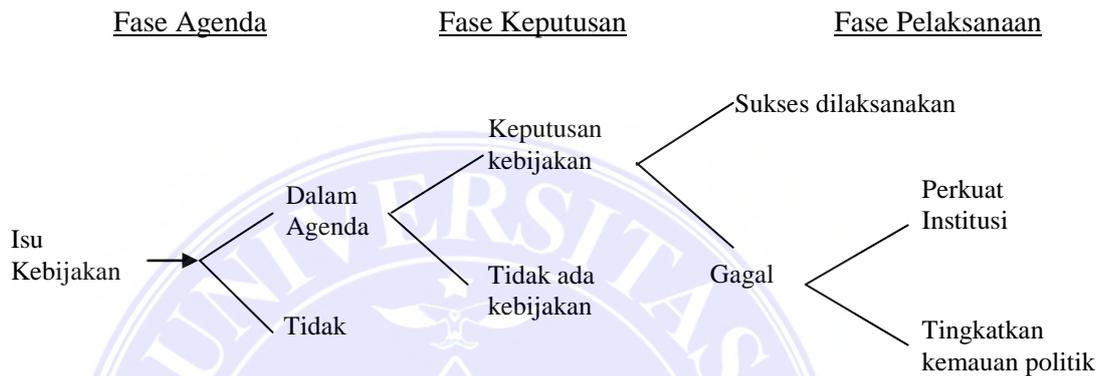


Gambar 2 : Implementation as a Political and Administrative Process

(Sumber : Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, p. 11)

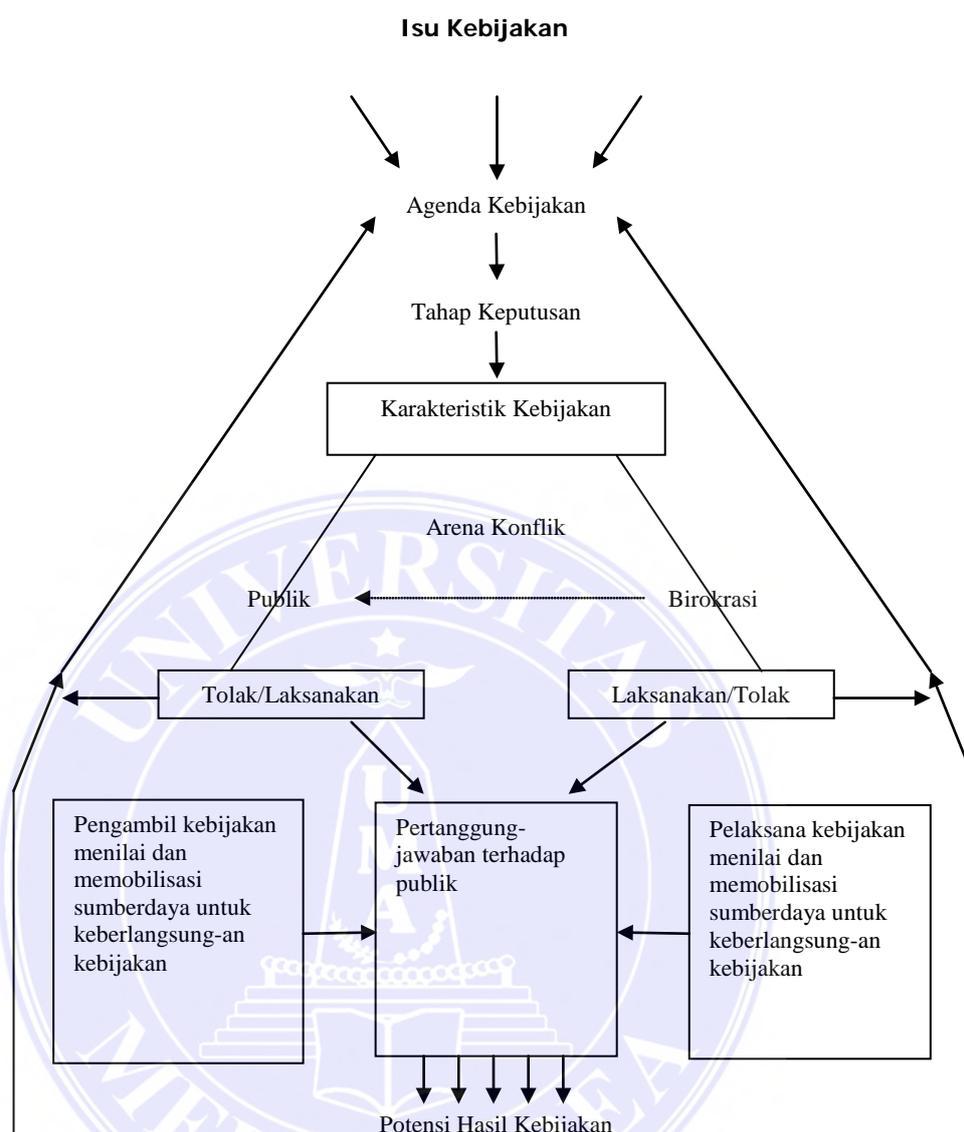
T.B. Smith mengakui, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Pada gambar 01 terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya

terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.



Gambar 3 : Model Linier Implementasi Kebijakan
(dikutip dari Baedhowi, 46-48)

Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (lihat Baedhowi, 2004: 47). Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.



Gambar 4. Model Interaktif Implementasi Kebijakan

(Sumber : Thomas R. Dye. 1981. *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, NY)

Berbeda dengan model linier, model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan

kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Pada Gambar 4 terlihat bahwa meskipun persyaratan input sumberdaya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

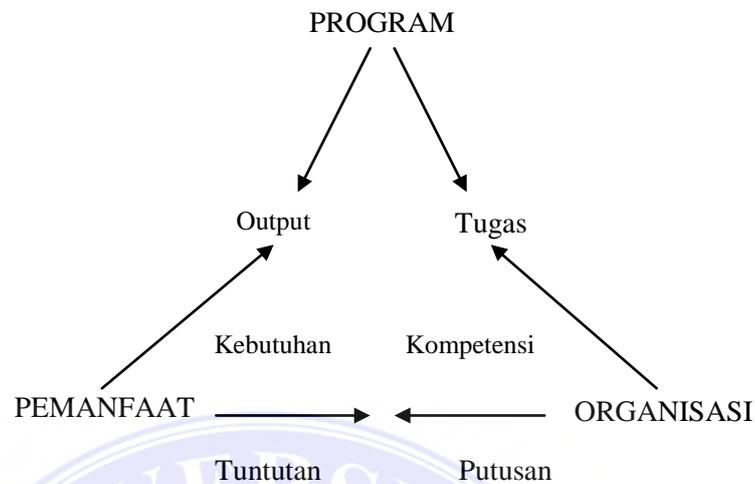
Jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan model implementasi kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya. Tujuan kebijakan, program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan. Sementara itu, enam elemen isi kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks implementasi sebagai faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi menurut Grindle mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut

dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, beserta output dan outcomenya.

Selain model implementasi kebijakan di atas Van Meter dan Van Horn mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan. (Tarigan, 2000: 20). Keduanya meneguhkan pendirian bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Tanpa mengurangi kredibilitas model proses implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa elemen yang menentukan keberhasilan penerapannya termasuk ke dalam elemen model proses politik dan administrasi menurut Grindle. Kata kunci yakni perubahan, kontrol dan kepatuhan termasuk dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Demikian pula dengan tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya termasuk dalam elemen isi kebijakan dan konteks implementasi menurut Grindle. Tipologi jumlah perubahan yang dihasilkan termasuk dalam elemen isi kebijakan dan tipologi ruang lingkup kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi.

Sejalan dengan pendapat di atas, Korten (baca dalam Tarigan, 2000: 19) membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.



Gambar 5. **Model Kesesuaian**
(Dikutip dari David C. Korten (1988) dalam Tarigan, h. 19)

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output

program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen yang disesuaikan satu sama lain—program, pemanfaat dan organisasi—juga sudah termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks implementasi (organisasi) maupun dalam outcomes (pemanfaat) pada model proses politik dan administrasi dari Grindle.

2.4. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi

pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin *et al.* (1990: 20-21, 31-40), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui: (i) besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan dan (ii) bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan atau program dari Korten juga relevan digunakan (lihat kembali Gambar 3 dan penjelasannya) sebagai kriteria pengukuran implementasi kebijakan. Dengan kata lain, keefektifan kebijakan atau program menurut Korten tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan di atas, perlu pula dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (lihat Grindle, 1980: 6) bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud

oleh keduanya meliputi: (i) ukuran dan tujuan kebijakan, (ii) sumber kebijakan, (iii) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (iv) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, (v) sikap para pelaksana, dan (vi) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Quade (1984: 310), dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan; (2) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya; (3) Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan; dan (4) Faktor lingkungan, yaitu elemen dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Sebagai komparasi dapat dipahami pemikiran Mazmanian dan Sabatier yang mengembangkan “kerangka kerja analisis implementasi” (lihat Wahab, 1991: 117). Menurutnya, peran penting analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal

pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud oleh Mazmanian dan Sabatier diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum, yaitu: (1) mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap; (2) kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya; dan (3) pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan. Ketiga variabel ini disebut variabel bebas yang dibedakan dengan tahap implementasi yang harus dilalui sebagai variabel terikat.

Variabel mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan mencakup: (i) kesukaran teknis, (ii) keragaman perilaku kelompok sasaran, (iii) persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan (iv) ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. Variabel kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasi mencakup: (i) kejelasan dan konsistensi tujuan, (ii) ketepatan alokasi sumber daya, (iii) keterpaduan hirarki dalam dan di antara lembaga pelaksana, (iv) aturan keputusan dari badan pelaksana, (v) rekrutmen pejabat pelaksana, dan (vi) akses formal pihak luar. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup: (i) kondisi sosial ekonomi dan teknologi, (ii) dukungan publik, (iii) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, (iv) dukungan dari pejabat atasan, dan (v) komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana (Keban, 2007: 16). Sedangkan variabel terikat yang ditunjukkan melalui tahapan dalam proses implementasi mencakup: (i) output kebijakan badan pelaksana, (ii) kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, (iii) dampak nyata output kebijakan, (iv) dampak output kebijakan sebagaimana yang dipersepsikan, dan (v) perbaikan.

2.5. Sistem Informasi Barang Milik Daerah

Menurut PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah meliputi: Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemerintah Kabupaten Dairi telah mendefinisikan aset yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria antara lain (1) mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, (4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan (5) memenuhi nilai minimal yang dapat dikapitalisasi.

BMD memiliki siklus penatausahaan yang dimulai dari perencanaan; penentuan kebutuhan; penganggaran; pengadaan; penyimpanan dan pengeluaran; penggunaan; pemanfaatan; pembinaan, pengendalian dan pengawasan; pemeliharaan; dan penghapusan. Dewi (2014) menyebutkan Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Aset juga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan berpengaruh signifikan terhadap penguatan sistem pengendalian intern (Arifin & Wulandari, 2014). Kecanggihan dari aplikasi teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Sistem Informasi Akuntansi (Ratnaningsih & Suaryana, 2014). Sehingga pada awal peluncurannya SIMDA-BMD telah dikembangkan sesuai dengan peraturan terkini, direncanakan terintegrasi dengan SIMDA Keuangan dan terdapat kesinambungan pengembangan aplikasi. Keterkaitan antara sistem informasi aset dengan sistem informasi keuangan akan memberikan keuntungan dengan dapat dilakukannya cek and balance antara arus kas dan arus aset (Rahayu, et. al, 2014). Program aplikasi SIMDA-BMD digunakan untuk pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang

daerah (BPKP, 2015). Setiap sub sistem dari aplikasi menghasilkan output sebagai berikut: 1. Sub sistem perencanaan menghasilkan Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah. 2. Sub sistem pengadaan menghasilkan Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan. 3. Sub sistem penatausahaan menghasilkan Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang. 4. Sub sistem penghapusan menghasilkan SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan. 5. Sub sistem akuntansi menghasilkan Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extracomptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD. 2.2. Pengendalian Intern Sistem Informasi Suatu sistem informasi berbasis komputer memerlukan beberapa pengendalian intern untuk menjamin bahwa sistem yang telah dirancang dapat digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang diharapkan. Ahmad, et. al (2013) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa pengendalian input merupakan pengendalian yang paling penting untuk mendukung kesuksesan satu sistem informasi akuntansi. Hall (2011) menyatakan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengendalian sistem informasi berbasis komputer antara lain:

- a. Pengendalian internet dan intranet yang meliputi pengendalian risiko dari ancaman subversif seperti pembajak/hacker dapat diaplikasikan dengan

penerapan firewall, dan enkripsi. Sedangkan pengendalian risiko dari kegagalan peralatan dalam sistem komunikasi dapat dilakukan dengan prosedur akuisisi hardware, prosedur pengendalian virus, keamanan fisik database, dan prosedur backup.

- b. Pengendalian pertukaran data elektronik meliputi otorisasi dan validasi transaksi serta pengendalian akses.
- c. Pengendalian aplikasi merupakan prosedur manual terprogram yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu pengendalian input, pengendalian proses dan pengendalian output.

Hal senada juga disampaikan oleh Nugraha dan Astuti (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa beberapa pengendalian yang telah diterapkan dalam aplikasi SIMDA Keuangan diantaranya:

- a. Pengendalian akses dan wewenang pemakai, pembatasan akses ke dalam aplikasi SIMDA dengan akun dan kata kunci serta pembagian kewenangan seperti administrator, supervisor dan operator.
- b. Pengendalian keamanan yang dilakukan dengan penggunaan uninterruptible power supply pada komputer sebagai pengaman daya.
- c. Pengendalian berdasarkan fungsi-fungsi menu secara terintegrasi ke dalam sistem untuk menjamin validitas masukan data.
- d. Pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian masukan untuk mengetahui kesalahan dalam memasukkan data, pengendalian proses untuk memastikan bahwa pemrosesan data telah dilaksanakan sesuai dengan

prosedur dan pengendalian keluaran yang bertujuan untuk menjamin output yang dihasilkan benar dan akurat.

2.6. Karakteristik Kualitas Informasi Laporan/Output

Sambasivam (2013) menyatakan bahwa evaluasi atas implementasi sistem informasi akuntansi mempertimbangkan dua hal yaitu biaya yang digunakan untuk proses perancangan sistem harus lebih rendah daripada manfaatnya dan kualitas data yang menjadi faktor penentu keberhasilan dari sistem. Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus berkualitas, sehingga bermanfaat bagi manajemen dalam melakukan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang diwujudkan untuk memenuhi tujuan informasi akuntansi.

Kieso, Weygandt & Warfield (2010) mengidentifikasi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang membedakan informasi yang lebih berguna dan informasi yang kurang berguna untuk pengambilan keputusan. Kualitas dasar terdiri dari relevan dan andal, agar relevan informasi tersebut harus:

- a. memiliki manfaat prediktif artinya informasi yang digunakan dapat membantu pemakai untuk membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini dan masa depan; dan
- b. memiliki manfaat umpan balik artinya informasi tersebut menyajikan keadaan di masa lalu.

Informasi yang andal memenuhi kriteria: (1) lengkap artinya informasi yang dilaporkan tidak ada yang diada-adakan ataupun dihilangkan; (2) bebas dari kesalahan artinya informasi yang dilaporkan bebas dari kesalahan penyajian; dan (3) netral artinya informasi tidak memihak untuk kepentingan kelompok tertentu. Sedangkan kualitas tambahan meliputi: (1) komparatif artinya dapat dibandingkan dengan informasi yang sejenis dan (2) konsisten artinya entitas menerapkan perlakuan yang sama.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi , yang beralamat di: Jl. Sisingamangaraja No.127 Sidikalang-Dairi, Telp : 0627-21068 dari bulan April s/d Mei 2018.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi sasaran pada penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam Implementasi Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi. Populasi dalam penelitian ini adalah : seluruh pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, yang berjumlah 37 orang. Mengingat jumlah populasi relatif kecil (kurang dari 100), maka seluruh populasi dijadikan sampel (*total sampling*).

3.4. Definisi Konsep

1. Implementasi kebijakan adalah Implementasi Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi menurut tatacara, aturan maupun ketentuan yang berlaku.

Meliputi aspek-aspek:

- a. Aspek kesesuaian pelaksanaan dengan aturan :
 - b. Aspek kesesuaian pelaksanaan dengan tatacara :
 - b. Aspek kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku:
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan dengan Implementasi Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, meliputi :
 - a. Komunikasi
Komunikasi adalah penyampaian informasi baik langsung maupun tidak langsung mencakup unsur komunikator, pesan, sasaran, media atau saluran dan efek, yang meliputi aspek-aspek :
 - 1). Aspek *transmisi* :
 - a). Kesesuaian antara pemahaman pelaksana dengan perintah kebijakan.
 - b). Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang jelas dan tepat sebagai tindak lanjut dari keputusan-keputusan dan perintah-perintah untuk melaksanakan Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah.

c). Pengetahuan pelaksana atas pelaksanaan kebijakan yang benar.

2). Aspek *konsistensi* :

a). Kesesuaian antara perintah-perintah dalam implementasi kebijakan dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaan.

b). Konsensus dalam pencapaian tujuan kebijakan.

3). Aspek kejelasan :

a). Kejelasan dari instruksi-instruksi tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah.

b). Kejelasan dalam penyampaian informasi tentang kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu yang dapat berupa benda atau keadaan yang mendukung pelaksanaan Implementasi Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, meliputi aspek-aspek :

1). Staf :

- Kemampuan yang dimiliki staf yang dapat menunjang pada pelaksanaan tugas.

2). Informasi :

- Informasi yang berguna untuk menterjemahkan kebijakan ke dalam pelayanan-pelayanan publik.

3). Wewenang :

- Kewenangan dalam memberikan sanksi untuk penghindaran pajak.

4). Fasilitas :

- Fasilitas yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan Implementasi Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.

c. Kondisi sosial

Ekonomi dan politik adalah keadaan sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi Implementasi Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, meliputi:

1). Aspek sosial ekonomi :

- Tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Dairi Sumatera Utara dan tingkat pendidikan Pimpinan dan staf yang mendukung pelaksanaan Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.

2). Aspek politik :

- Pendapat umum tentang pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah.

3.5. Metode Pengambilan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi *data primer* dan *data sekunder*. *Data primer*, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui :

- a. *Kuesioner*, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dari responden melalui daftar pertanyaan tertutup dan terbuka yang diajukan. Dengan menyajikan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditentukan.
- b. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan *data sekunder*, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah.

3.6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan khususnya dari penyebaran angket akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut analisa tabel frekwensi. Analisa tabel tunggal (frekwensi) ini dimaksudkan untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan presentase dari masing-masing jawaban reesponden, sehingga akan dapat diketahui data yang paling dominan, atau yang paling besar persentasenya.

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi sebagai berikut :

- 1) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi dilihat dari komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi telah berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang ada pada Prosedur pengelolaan BMD yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) yang diterapkan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi sebagai aplikasi berbasis computer sangat membantu pemerintah mengelola barang milik daerah sehingga dapat menghasilkan laporan-laporan yang berguna bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan untuk rencana yang akan datang.

3) Aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai aplikasi berbasis komputer yang secara teritegrasi cukup baik dalam membantu pemerintah mengelola barang milik daerah. Prosedur pengelolaan BMD yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagian besar telah diimplementasikan oleh aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Namun aplikasi tersebut terdapat kekurangan yaitu prosedur akuntansi belum dapat diterapkan karena fungsi sub menu penyusutan belum diakomodir.

5.2. Saran - saran

Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi dan guna mengatasi berbagai hambatan yang dijumpai di lapangan, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Agar aplikasi Sistem Informai Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dilakukan perbaikan pada menu akuntansi dengan menambahkan prosedur penyusutan, sehingga informasi yang dihasilkan oleh aplikasi dapat menyajikan nilai buku yang relevan, andal dan wajar sesuai dengan kondisi Pemerintah Daerah setempat. yang sebenarnya. Dengan penambahan fungsi penyusutan tersebut, aplikasi akan mampu

mengakomodir kebijakan akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Daerah setempat.

- b) Untuk memudahkan penggunaan, pengembangan aplikasi SIMDA-BMD berbasis web sangat diperlukan. Sehingga memperlancar fungsi verifikasi dan koordinasi terkait pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c) Komunikasi timbal balik antara Pimpinan SKPD dan Pengurus barang harus sering dilakukan karena dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan .
- d) Sumber Daya pada Pengurus Barang selaku pengguna aplikasi SIMDA-BMD perlu disetarakan baik dibidang pendidikan/pelatihan.
- e) Kondisi Sosial pada Pengurus Barang perlu ditingkatkan Agar semangat kerja terdorong, sehingga mereka semangat untuk berprestasi berupa perhatian dari atasan, insentif/tambahan penghasilan dan fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Republik Indonesia. (2005).
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Republik Indonesia. (2010).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Republik Indonesia. (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Republik Indonesia. (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Republik Indonesia. (2016).
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi; Kabupaten Dairi (2014).
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi; Kabupaten Dairi (2014).
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi; Kabupaten Dairi (2014).
- Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah; Kabupaten Dairi (2015).
- Abdul Wahab, Solichin, 1997, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

- Alfian, Mohammad. (2014). Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD (Penelitian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo). 3rd Economics & Business Research Festival. Hal. 1698 – 1712;
- Baedhowi. 2004. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- BPKP. (2015). Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Retrieved from: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>;
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press.
- Danim, Sudarwan, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung.
- Dewi, Andini Kusuma. (2014). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir. (Studi Kasus pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau);
- Edwards III, George C., 1980, Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Inc., United States of America.
- Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
- Goggin, Malcolm L et al. 1990. Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation, Scott, Foresmann and Company, USA.

- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Iskandar, Deni. (2015). *Analysis Of Factors Affecting The Success Of The Application Of Accounting Information System*. *International Journal Of Scientific & Technology Research*. Vol. 4 No. 2; Kabupaten Banjarnegara. (2012).
- Kemeristek. (2006). *Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2005-2025*. Diakses 16 Pebruari 2016. Available from: *Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 5 No.1 Januari - Juni 2016 128* http://directory.umm.ac.id/tik/buku_putih_bidang_tik.pdf
- Kumorotomo, W. & Margono, SA. (2009). *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Laksono, Hari. (2015). *Evaluasi Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) pada Pemerintah Kabupaten Klaten*.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mubarak N. (2015), *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA Keuangan) Dalam Mendukung Kecepatan Laporan dan Pengawasan*

Keuangan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo
(Tesis). Makassar: Universitas Hasanuddin.

Nugraha, Adi Harmadhani dan Astuti, Yuli Widi. (2013). Analisis Penerapan
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam
Pengolahan Data Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi
Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). Vol.2 No.1 Hal. 23-33;

Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.

Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, Administration & Society :
The Policy Implementation Process A Conceptual Framework, Sage
Publications Inc., Ohio.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Sambasivam, Yuvaraj. (2013).

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo
Yogyakarta.

Winardi, 1983, Pengantar Ekonomi Pembangunan, Tarsito, Bandung.